



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/917/K/411.013/2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
KEPADA PT SINERGI GULA NUSANTARA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf e, dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 154 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (8), Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional dan untuk percepatan penyelesaian proyek strategis nasional dan pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bupati sesuai kewenangannya mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, Lampiran Angka II Nomor Urut 12, menetapkan Program Strategis Nasional "Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo dan SupportingCo";
- d. bahwa PT. Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) sebagai Proyek Strategis Nasional menyampaikan surat kepada Bupati Nganjuk Nomor BD01-INSIP-SBI/20240514.020 tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional di PT Sinergi Gula Nusantara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada PT Sinergi Gula Nusantara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/1276/SJ tanggal 13 Maret 2024 perihal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;
  2. Surat Direktur Utama PT. Sinergi Gula Nusantara Nomor BD01-INSIP-SBI/20240514.020 tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional di PT Sinergi Gula Nusantara;
  3. Daftar Aset PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 4 di Kabupaten Nganjuk yang diahlikan kepada *Subholding SupportingCO* yang dimuat pada Surat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I Nomor HQ-DIRUT/X/2024.05.08-5 tentang Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara I.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PT SINERGI GULA NUSANTARA.
- KESATU : Memberikan Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PT Sinergi Gula Nusantara berupa pembebasan atau 0% (nol persen) seluruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap asetnya yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) kepada PT Sinergi Gula Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas aset-aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian data serta informasi atas peralihan aset PT Sinergi Gula Nusantara, maka PT Sinergi Gula Nusantara wajib membayar seluruh kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

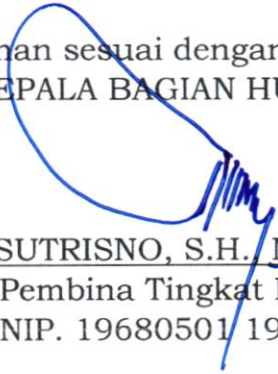
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/917/K/411.013/2024

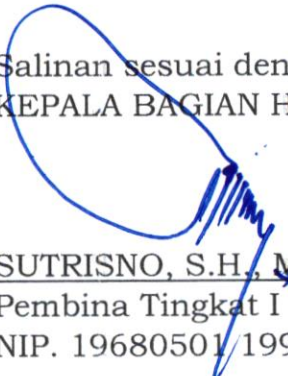
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PT SINERGI GULA NUSANTARA

DAFTAR ASET TANAH DAN BANGUNAN PT SINERGI GULA NUSANTARA  
YANG MENDAPAT PEMBEBASAN SELURUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	Pemilik Aset	Eks PTPN	Lokasi		Jenis Hak	No. Sertifikat	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
			Desa	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	15	810	Diberikan pembebasan seluruh BPHTB atau tarif BPHTB 0% (nol persen)
2.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	17	506	
3.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	18	1.912	
4.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	33	6.995	
5.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	16	2.600	
6.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	27	41.000	
7.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	12	3.306	
8.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	13	3.967	
9.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	28	7.176	
10.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	22	1.446	
11.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	21	1.445	
12.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	19	1.648	

NO.	Pemilik Aset	Eks PTPN	Lokasi		Jenis Hak	No. Sertifikat	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
			Desa	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	20	1.646	Diberikan pembebasan seluruh BPHTB atau tarif BPHTB 0% (nol persen)
14.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	30	17.120	
15.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Patianrowo	Patianrowo	HGB	14	12.895	
16.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	29	13.500	
17.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	36	3.110	
18.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	32	9.930	
19.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	31	6.000	
20.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	34	1.231	
21.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	19	5.065	
22.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	35	4.805	
23.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	22	133	
24.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	23	3.730	
25.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	24	188	
26.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	25	175	
27.	PT SINERGI GULA NUSANTARA / PG Lestari	PTPN 10	Ngrombot	Patianrowo	HGB	26	1.760	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA